



Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

BPK RI: Pemprov Harus Secepatnya Mendata Aset-aset

Borneo Tribune, Pontianak
Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan.

Keberhasilan ini diperoleh masih sama seperti tahun lalu. Yakni predikat tersebut didapat saat menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kalbar, yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio, di Balairungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (21/8).

"Hal yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan adalah terkait masih adanya informasi yang belum lengkap mengenai lokasi, luas

serta status tanah untuk gedung dan bangunan," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (21/8).

Menurutnya, opini WTP ini tidak secara material mempengaruhi penyajian aset tetap gedung dan bangunan pada laporan tersebut. Ada pun neraca Pemprov Kalbar per 31 Desember 2013, menyajikan total aset sebesar Rp 4,85 triliun. Sedangkan kewajiban sebesar Rp 106,73 miliar dan ekuitas sebesar Rp 4,74 triliun.

Sementara itu, dalam realisasi anggaran yang berakhir per 31 Desember 2013, untuk Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 3,31 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 3,26 triliun,

....Ke Halaman -11

Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,47 triliun. Dengan realisasi Rp 3,30 triliun termasuk transfer bagi hasil ke kabupaten/kota.

"Pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp 162,04 miliar direalisasikan seluruhnya 100 persen. Dengan jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 127,75," terangnya.

BPK RI berharap, LHP yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya. "Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke-

uangan Negara, gubernur beserta jajarannya diharapkan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Yakni selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," ujarnya.

Masih terkait hal tersebut, Sub Direktorat II Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Joni Rindra Putra menjelaskan, tempo 60 hari yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut tidak bersifat baku.

"Nanti akan kita lihat seperti apa perbaikannya, harusnya tetap Pemprov proses dalam 60 hari ke depan. Progresnya bagaimana. Namun 60 hari itu tidak harus selesai. Minimal ada progresnya, karena permasalahan aset bentuk tanah

itu tidak bisa secepatnya," ucap Sub Direktorat II Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Joni Rindra Putra.

Joni berpendapat, jika tidak diselesaikan, aset Pemda bisa bermasalah, bahkan hilang. Untuk itu Pemprov Kalbar harus secepatnya mendata aset-aset yang belum terdata dengan lengkap itu. "Namun Joni enggan menyebut rincian aset di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalbar yang belum didata tersebut.

"Ada beberapa, cuma kalau luasannya kita belum tahu. Tujuan kita sebagai pemeriksa untuk memberikan rekomendasi sehingga pengelola keuangan pemerintah daerah ini bisa lebih bagus," paparnya. (St)